



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Maret 2017

Halaman: 2

Tiga PPK Dilaporkan ke DKPP

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK), yang bertugas saat Pilkada Kota Yogyakarta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu DIY. Pasalnya 3 PPK itu tidak melaksanakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan.

"Seluruhnya sudah kami laporkan ke DKPP melalui Bawaslu DIY. PPK Danurejan dilaporkan sekitar dua pekan lalu, sedang Gondokusuman dan Umbulharjo dilaporkan sekitar satu pekan lalu," kata Ketua Panwas Pilkada Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin, Rabu (15/3).

Sebelum menyampaikan laporan ke DKPP, Panwas Pilkada Kota Yogyakarta sudah melakukan klarifikasi terhadap ketiga PPK atas dasar laporan dari masyarakat. Khusus untuk PPK Gondokusuman dan Umbulharjo, laporan yang disampaikan berubah menjadi temuan Panwas Pilkada Kota Yogyakarta.

Ketiga PPK tersebut dilaporkan ke DKPP karena tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yaitu untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Yasin menegaskan, laporan Panwas Kota Yogyakarta ke DKPP tidak ada hubungannya dengan gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Ketua PPK Umbulharjo Suwendro yang dilaporkan ke DKPP mengatakan, menunggu arahan dari KPU Kota Yogyakarta. "Saya tunggu arahan, harus bagaimana dan apa saja yang harus disiapkan," katanya. Sepengetahuannya, laporan ke DKPP tersebut disebabkan PPK Umbulharjo tidak menjalankan rekomendasi Panwascam Umbulharjo saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. "Rekomendasi itu tidak disampaikan dalam forum rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di pendopo kecamatan, tetapi di ruangan pada saat berdiskusi bersama dengan KPU DIY, KPU Kota Yogyakarta dan Panwascam dan camat mengenai situasi rekapitulasi," katanya.

Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, saksi dari salah satu paslon menginginkan pembukaan kotak surat suara tidak sah. Suwendro mengatakan, masa tugasnya sebagai PPK akan berakhir pada bulan ini. "Namun, kami juga belum tahu apakah ada perpanjangan atau tidak karena sidang gugatan ke MK," katanya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005